

BAB IV

KEBIJAKAN YANG DIAMBIL DAN KERJASAMA YANG DILAKUKAN

Dalam menghadapi Krisis Keuangan Asia, China tentu saja melakukan serangkaian upaya guna menyelamatkan diri agar tetap pada posisi aman. Setelah dapat melewati krisis tersebut, China juga tetap menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain, terutama negara-negara yang terdampak parah dari krisis tersebut. Indonesia juga mengeluarkan serangkaian kebijakan yang kemudian dilaksanakan selama krisis berlangsung. Selain itu, Indonesia juga tetap aktif dalam organisasi internasional dan menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain.

A. Upaya yang dilakukan China dalam menghadapi Krisis Keuangan Asia

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh China dalam menghadapi krisis tersebut yang pertama adalah menerapkan kebijakan pintu terbuka atau *open door policy* dengan menciptakan Zona Ekonomi Khusus (ZEK) di provinsi pesisir selatan, yang pada dasarnya merupakan zona pemrosesan ekspor yang terbuka untuk perdagangan internasional dan investasi asing.

Kedua, China juga menciptakan Zona Perdagangan Bebas dan Zona Pengembangan Teknologi Tinggi, yang diarahkan untuk menarik investasi asing di sektor teknologi dan mempromosikan penelitian dan pengembangan. Hal ini memberikan perlindungan bagi para investor asing yang tidak dinikmati oleh perusahaan dalam negeri atau China.

Ketiga, Pemerintah China melonggarkan kontrol pada akun giro, namun masih memperhatikan serangkaian kontrol pertukaran pada akun modal. Langkah keempat, Pemerintah China juga bijak dalam mengontrol arus masuk modal atau

investasi dan juga menggunakan kebijakan moneter yang terkendali.

Kelima, Pemerintah China memberikan kebebasan pada penduduk maupun bukan penduduk agar dapat membeli mata uang asing untuk transaksi modal atau meminjam Renmibi untuk penjualan ke depan secara bebas namun dalam jumlah yang telah dibatasi oleh Pemerintah.

Terakhir, China mampu mengatur dengan baik arus modal yang masuk berbentuk investasi langsung atau *Foreign Direct Investment* (FDI), yaitu investasi riil di pabrik, peralatan modal, dan fasilitas produktif lainnya.

Adanya kebebasan yang diberikan oleh Pemerintah China dalam hal pertukaran mata uang, kegiatan ekonomi pasar, ataupun masuknya arus modal, semuanya tetap di kontrol dengan baik sehingga dapat membuat China berada dalam posisi yang aman jika dibandingkan dengan negara negara lain.

Selain itu, China juga memiliki juga memiliki cadangan devisa yang cukup besar yaitu senilai lebih dari US\$154,7 miliar sehingga ketika negara negara lain mulai jatuh setelah adanya krisis, seperti Indonesia, Malaysia, Korea Selatan dan lain lain, China masih tetap stabil walaupun negara negara mitranya tidak. Hubungan bilateral yang terjalin antara China dengan negara negara di Asia, khususnya Asia Tenggara masih tetap berlangsung setelah adanya krisis keuangan Asia.

B. Kerjasama dengan negara lain

1. Sejarah hubungan bilateral antara Indonesia dengan China

Hubungan negara Indonesia dengan Republik Rakyat China sudah terjadi pada zaman dahulu dan Apa bila di telusuri hubungan kedua negara tersebut sudah terjadi ribuan tahun yang lalu atau sekitar 2000 tahun yang lalu, dimana hubungan

ini terjadi pada masa nenek moyang Indonesia dengan nenek moyang Republik Rakyat China. Keeratan hubungan kedua negara diketahui melalui kedatangan etnis yang berasal dari negara China menuju ke Indonesia, untuk pertamakalinya yang telah dapat dibuktikan pula dengan adanya peninggalan-peninggalan benda-benda kuno dan bersejarah dari kerajaan-kerajaan kuno Indonesia dimasa lampau dimana telah memiliki kaitan yang erat dengan etnis China, seperti kerajaan Sriwijaya, Airlangga, dan pada kerajaan Majapahit. Sebagai suatu simbolik hubungan Indonesia dengan Republik Rakyat China ketika pada saat masa nenek moyang, dimana pada saat itu muhibah Cheng Huo menemukan momentum simbolik kedalam kisah perjalanannya yang masyur pada abad ke 14. Bukti interaksi antara Indonesia dengan Republik Rakyat China berupa budaya itu ada, yaitu Bedug yang hanya di gunakan di mesjid-mesjid ataupun mushollah yang ada di Indonesia.²⁸ Pada era modern seperti sekarang, hubungan anatara Indonesia dengan Republik Rakyat China mencapai fase kedekatannya dimana terjadi pada pasca kemerdekaan Indonesia. Begitu pula pada periode awal hubungan bilateral Indonesiadengan Republik Rakyat China yang terjadi pada rentang waktu 1950 hingga 1967. Secara resmi, hubungan negara Indonesia dengan Republik Rakyat China terjadi pada tahun 1950. Dimana pada saat itu Indonesia telah mengakui berdirinya China yang baru, yaitu sebagai negara yang menganut sistim komunis dan Negara Indonesia tercatat sebagai negara yang pertama dalam mengakui pemerintahan China yang bersifat komunis.²⁹

Pada tahun 1953, Indonesia telah mengirimkan utusan Duta besar untuk Republik Rakyat China yang bernama Arnold Mononutu. Pengiriman Duta besar Indonesia untuk Republik Rakyat China pertama kali sebagai tanda awal eratnya hubungan Indonesia dengan Republik Rakyat China. Hubungan Indonesia dengan Republik Rakyat China telah terjadi sekitar 65 tahun yang lalu yang secara resmi dalam menjalin hubungan

²⁸ Repository.usu.ac.id, 2011

²⁹ Repository.usu.ac.id, 2011

Diplomatik. Hubungan yang dijalin oleh Indonesia dengan Republik Rakyat China pada saat itu merupakan komitmen yang nyata dimana kebijakan luar negeri Indonesia yang bersifat bebas dan aktif dalam keadaan perang dingin pada saat itu.

2. Pada era Presiden Ir. Soekarno (1945-1966)

Pada April 1950, Indonesia pertama kali membuka gerbang diplomatik dengan Cina. Kerja sama antara kedua negara mencapai puncaknya saat Konfrensi Asia Afrika (Liputan6, 2005). Hubungan diplomatik Indonesia dengan Republik Rakyat China tersebut mulai menunjukkan perkembangan yang terbilang positif yaitu di tunjukan dengan kehadiran perdana Republik Rakayat China yaitu Zhou En Lai beserta delegasi pada Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 18-25 April 1955 (Indonesia CRI, 2009). Dimana konfrensi Asia-Afrika ini dilakukan di Indonesia yaitu lebih tepatnya dilakukan di kota Bandung, Jawa barat. Dalam konfrensi Asia Afrika “Lima prinsip hidup berdampingan secara damai” yang dikemukakan pemerintah Republik Rakyat China dan disponsori bersama dengan pemerintah India dan pemerintah Myanmar mendapat dukungan dari seluruh peserta. kehadiran perdana Republik Rakayat China yaitu Zhou En Lai secara resmi datang ke Indonesia pasca Konfrensi Asia Afrika. Indonesia dengan Republik Rakyat China pun sepakat akan mempererat hubungan mereka yang telah terjalin baik pada saat itu dan ditandai dengan penandatanganan perjanjian persahabatan dan persetujuan kerja sama di bidang kebudayaan pada 1 April 1961.³⁰ Dalam konteks hubungan luar negeri yang lebih luas lagi Indonesia menganggap Republik Rakyat China amat penting apalagi pada tahun 1965 Indonesia keluar dari negara anggota PBB dan begitu juga bagi Republik Rakyat China menganggap Indonesia penting bagi mereka terlebih lagi Republik Rakyat China tidak termasuk kedalam anggota PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa).

³⁰ Indonesia CRI, 2009

3. Pada era Presiden Jend. Soeharto (1966-1998)

Berakhirnya masa pemerintahan Presiden Ir. Soekarno ditandai dengan adanya Supersemar yang kita tau yaitu Surat Perintah Sebelas Maret yang membawa seorang Jendral dari dunia militer Indonesia yaitu bapak Jenderal Soeharto yang menaiki kursi pemerintahan. Terjadinya pergantian kepemimpinan yang baru ini memberikan dinamika baru pada struktur dan sistem politik di Negara Indonesia, dan didalam proses pengambilan suatu keputusan. Sebagai seorang pemimpin yang baru pada masa orde baru, Jendral Soeharto menghadirkan perubahan dalam menjalankan roda pemerintahan Indonesia. Pada awal masa pemerintahannya, Jendral Soeharto cenderung bersikap pasif terhadap politik luar negeri Republik Indonesia dan bapak Jendral Soeharto juga memiliki dewan penasihat yang mendampingi dalam mengambil sebuah keputusan. Setelah Indonesia berada didalam kekuasaan militer dan pada saat itu pula pemerintahan yang disebut Orde baru dimulai yang dipimpin oleh bapak Jend. Soeharto dan melalui memorandum (berupa surat) yang berasal dari Departemen Luar Negeri yang di kirim langsung ke China, memorandum tersebut berisi dengan resmi negara Indonesia menegaskan untuk membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat China dan terhitung sejak 30 oktober 1967 dan setelah terjadinya pemberontakan “Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30SPKI)” pada 30 september 1965.³¹

Presiden kedua Republik Indonesia Jendral Soeharto telah memulai pemerintahan Orde baru dalam dunia politik Indonesia dan secara cepat mengubah kebijakan dalam negeri dan juga bapak Soeharto mengubah kebijakan luar negeri Indonesia yang telah di tempuh oleh bapak Soekarno di akhir masa jabatannya. Karena orde baru pada saat itu lebih mementingkan perbaikan dan melakukan perkembangan ekonomi sebagai landasan tujuan utama dari pemerintahan Orde

³¹ Indonesia.com, 2011

baru. Pemerintahan Orde baru juga menjalankan kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi yang berasal dari didikan dunia Barat

Setelah membekunya hubungan Indonesia dengan Republik Rakyat China sejak 30 oktober 1967 Presiden kedua Republik Indonesia yaitu Bapak Suharto pada kali itu mencoba untuk membangkitkan atau menhidupkan lagi hubungan Indonesia dengan Republik Rakyat China yaitu pada saat Presiden Soeharto bertemu Menteri Luar Negeri Republik Rakyat China saat itu Qian Qichen, dalam upacara pemakaman Kaisar Hirohito di Tokyo pada 24 Februari 1989. Pertemuan yang dilakukan oleh presiden Jendral Soekarno tidak berhenti disitu saja dan dilanjutkan pembahasan normalisasi hubungan Indonesia dengan Republik Rakyat China oleh Menteri Luar Negeri Indonesia yang pada saat itu adalah Ali Alatas. Menteri Luar Negeri melakukan pertemuan dengan Qian Qichen yang pada saat itu menjadi Menteri Luar Negeri Republik Rakyat China pada 4 Oktober 1989 di Tokyo. Yang dimana hasilnya kedua menteri luar negeri tersebut telah menandatangani Komunike Bersama, yaitu "The Resumption of The Diplomatic between The Two Countries" pada 3 Juli 1990. Setelah penandatanganan tersebut selesai dan perdana menetri Republik Rakyat China Li Peng melakukan kunjungan ke Indonesia serta menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman bahwasannya hubungan Diplomatik antara Indonesia dengan Republik Rakyat China telah pulih kembali pada 8 Agustus 1990 setelah pembekuan selama 23 tahun lamannya.³² Keberhasilan hubungan diplomatik ini seperti didorong oleh faktor ekonomi perdagangan dan Dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada tahun 1988 tersurat bahwa dalam rangka mengembangkan ekspor non migas maka perlu dicarikan peluang pasar baru untuk menyerap ekspor komoditas non migas Indonesia. Pada era presiden kedua Jendral Soeharto,

³² Repository.umy.ac.id, 2017

penormalisasian tentang hubungan Indonesia dengan Republik Rakyat China pada awal tahun 1990-an yang amat bernilai bagi Republik Rakyat China yang pada saat itu tengah dikecam oleh dunia Barat setelah peristiwa Tiananmen (Peristiwa pembantaian di lapangan Tiananmen).

Presiden Soeharto pun melakukan kunjungan balasan pada tanggal 14 sampai 18 November 1990 dan beliau juga menyaksikan penandatanganan pembentukan Komisi Bersama Bidang Ekonomi, Perdagangan, dan Kerja Sama Teknik. Normalisasi hubungan tersebut kemudian secara bertahap membuka hubungan ASEAN dan Tiongkok, hingga akhirnya pada 1996 Republik Rakyat China menjadi mitra dialog penuh ASEAN. Bagi Indonesia, dalam sektor ekonomi, hubungan dengan Republik Rakyat China menjadi sangat penting, terutama setelah negara ini dihantam badai krisis finansial Asia pada 1997.

4. Pada era presiden Habibie (1998-1999)

Presiden Republik Indonesia ketiga dijabat oleh bapak Bacharuddin Jusuf Habibie, yang juga dulu beliau merupakan mantan wakil presiden kedua yaitu Jendral Soeharto. Tak heran bagi kita masyarakat Indonesia yang hampir semua mengetahui sepeak terjal bapak Habibie dengan kejeniusannya dan prestasi-prestasi yang telah beliau raih di kaca International yang mengantarkan beliau menjadi orang nomor satu di dalam negeri ini. Pada era orde baru, bapak Habibie harus meningkatkan kerja kerasnya dalam menghadapi kondisi negara yang pada saat itu masih terjadi carut-marut dan juga bapak Habibie melakukan pemulihan terhadap berbagai bidang yang ada pada Republik Indonesia terkhususnya permasalahan dibidang perekonomian.

Dengan masa jabatan bapak Bacharuddin Jusuf Habibie sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia yang terbilang sangat singkat, permasalahan-permasalahan luar negeri terkhususnya hubungan Diplomatik dengan Republik Rakyat

China tidak menyita perhatian dan penyelesaian yang dignifikan. Pada masa kepemimpinan bapak Bacharuddin Jusuf Habibie yang dilakukan yang berkaitan dengan China hanya mengatasi persoalan minoritas yang dialami oleh masyarakat China yang ada di Indonesia atau masyarakat yang memiliki keturunan dari China. Seperti, penghapusan kode inisial K-1 yang terdapat pada KTP (kartu tanda penduduk) dengan menggantikan sebutan “TIONGHOA” sebagai warga Indonesia yang memiliki keturunan China dan juga pada zaman bapak Bacharuddin Jusuf Habibie ini juga mengakui agama Konghuchu sebagai agama yang ada di Indonesia serta menjadikan Bahasa Mandarin sebagai suatu mata pelajaran bahasa asing di Indonesia. Namun rencana tersebut tidak terbukti terlaksana dengan baik. Selain itu dikeluarkan pula Instruksi Presiden (Inpres) No 26/1998, yang berisi tentang dihapuskannya istilah pribumi dan nonpribumi.³³

5. Pada masa era Abdurrahman Wahid (1999-2001)

Setelah berakhirnya masa kepemimpinan bapak Bacharuddin Jusuf Habibie sebagai Presiden ketiga dan kemudian MPR (Majelis Pemusyawaratan Rakyat) mengadakan rapat atau berkumpul guna pembahasan untuk menggantikan posisi bapak Bacharuddin Jusuf Habibie sebagai Presiden dan mengadakan pemilihan Presiden yang kemudian terpilih yaitu Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan sapaan Gus Dur sebagai Presiden keempat. Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia keempat pada tanggal 20 Oktober 1999.

Terpilihnya Gus Dur sebagai presiden tidak terlepas dari keputusan MPR yang menolak laporan pertanggung jawaban Presiden B.J. Habibie. Sebelum terpilih menjadi Presiden keempat, bapak Abdurrahman Wahid sebagai politikus yang mendirikan partai politik PKB dan mengikutsertakan partainya ke dalam pemilu legislatif hingga

³³ Repository.umy.ac.id, 2017

dirinya menjadi kandidat pada pemilihan presiden. Kepemimpinan Abdurrahman Wahid yang berlangsung pada periode tahun 1999-2001 ini, memiliki agenda perpolitikan dalam rangka untuk pemulihan perekonomian Republik Indonesia dan perbaikan citra politik di mata dunia internasional yakni dengan cara melakukan kunjungan ke negara-negara di dunia termasuk Republik Rakyat China. Kunjungan yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid yaitu untuk menarik para investor agar bersedia menanam investasi mereka di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan hubungan Diplomatik antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat China, Abdurrahman Wahid telah membuka peluang persahabatan antar kedua negara dimana pada masa sebelumnya hubungan Indonesia dengan China kurang bersahabat dan membeku sepanjang pemerintahan Orde Baru, Republik Rakyat China yang menjadi negara pertama yang dikunjungi oleh bapak Presiden keempat Abdurrahman Wahid setelah pelantikan dirinya sebagai presiden yaitu pada tanggal 1-3 Desember 1999. Melalui kunjungan yang telah dilakukan oleh Abdurrahman Wahid di China membuat babak baru hubungan Diplomatik Republik Indonesia dengan Republik Rakyat China dan menjadi dasar sebagai pernyataan kerjasama di bidang ekonomi, politik dan keamanan.

Abdurrahman Wahid yang melakukan terobosan tersendiri guna menghilangkan penindasan terhadap minoritas terkhususnya orang-orang Tionghoa (keturunan China). Salah satu bentuk dari tindakan bapak Abdurrahman Wahid adalah mencabut instruksi Presiden No. 14 tahun 1967 dan bapak Abdurrahman Wahid menggantikan dengan dikeluarkannya Peraturan baru dari Presiden yaitu Peraturan Presiden No. 6 tahun 2000 tentang hal beragama, kepercayaan dan adat istiadat Etnis Tionghoa.³⁴ Dengan telah dikeluarkannya peraturan Presiden yang baru tersebut oleh bapak Abdurrahman Wahid menjadikan suatu pencerahan bagi orang-orang yang memiliki

³⁴ Repository.umy.ac.id, 2017

etnis Tionghoa di Indonesia untuk diberi Hak untuk menghidupkan budaya Tionghoa mereka yang akan semakin terbuka.

Bapak Abdurrahman Wahid memiliki pandangan tersendiri sebagai Presiden pemimpin negara ini yaitu para etnis Tionghoa (China) memiliki potensi yang berarti dalam hal membantu pemulihan perekonomian Indonesia. Akan tetapi apabila di lihat dari situasi dalam negeri yang masih cenderung memiliki sifat Rasis maka kecil kemungkinan etnis Tionghoa akan dengan mudah dan lancar untuk keikutsertaan mereka dalam membantu perekonomian Indonesia. Sehingga menurut bapak Abdurrahman Wahid, sistem pemerintahan yang rasialis harus dihilangkan agar para pemilik modal yang rata-rata adalah elite Tionghoa dapat secara aman berinvestasi kembali di Indonesia.

6. Pada masa era Megawati (2001-2004)

Megawati konsisten dengan pandangan politik-ideologisnya. Anak kandung dari salah satu Presiden Republik Indonesia yaitu bapak Ir. Soekarno itu akan mewarisi pandangan ideologis bapaknya yang membangun poros 'Jakarta – Peking'. Pada masa presiden kelima Republik Indonesia yaitu ibuk Megawati Soekarno Putri bahwa hubungan Indonesia dengan Republik Rakyat China terus mengalami peningkatan yang signifikan. Megawati pernah melakukan kunjungan kenegaraan ke China yaitu lebih tepatnya di Beijing. Kunjungan kenegaraan yang dilakukan oleh Megawati yaitu melakukan kesepakatan dengan pemerintah Republik Rakyat China dalam melakukan peningkatan kerja sama dalam bidang ekonomi dan politik. Kesepakatan yang dicapai antara lain pembukaan konsulat jenderal baru di sejumlah kota, baik China maupun Indonesia, dan pembentukan forum energi antarkedua negara. Perdagangan bilateral antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat China terjadi peningkatan yaitu yang tadinya hanya 2 milyar sampai \$8 AS dan investasi China juga

meningkat pada tahun 1999 yaitu \$282 AS naik pada tahun 2003 menjadi \$6,8 miliar AS.³⁵

7. Pada masa era Susilo Bambang Yudoyono (2005-2015)

Klimaks dari hubungan bilateral Republik Indonesia dengan Republik Rakyat China yaitu pada pemerintahan Presiden keenam Republik Indonesia yaitu bapak Susilo Bambang Yudoyono. Perdagangan dengan China memang membuat Keprihatinan kepada Indonesia terlebih lagi negara Republik Rakyat China telah menjadi anggota WTO pada tahun 2001. Dari pihak Republik Rakyat China telah mengeluarkan angka statistik yang telah diterbitkan yang memperlihatkan angka Surplus bagi Republik Indonesia dan Indonesia sepertinya juga telah menerbitkan angka statistik seperti yang dilakukan oleh China, akan tetapi hasilnya berbeda. Para pengusaha kalangan kecil dan kalangan menengah memang begitu merasakan keluhan akan “ancaman” barang murah dari China. Pada tahun 2008 yaitu pada saat itu terjadi krisis keuangan Global dan yang ditakutkan kalau China akan mengalihkan produk eksportnya dan mengirim ke negara-negara tetangganya termasuk Indonesia.

Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudoyono telah melakukan penertiban arus perdagangan Indonesia dengan China kepada Kementerian Perdagangan dan Instansi dan penertiban ini dilakukan karna adanya perbedaan data nilai perdagangan antara Indonesia dengan China. Presiden pun menunjuk Menteri Perdagangan yang pada saat itu dipimpin oleh Gita Wirjawan untuk mengusut permasalahan dan menindak siapa pun yang melanggar hukum. Indonesia mencatat nilai perdagangan kedua negara mencapai USD50 miliar, sedangkan China mencatat nilai sebesar USD60 miliar. Presiden keenam ini memiliki pandangan terhadap masalah

³⁵ Repository.usu.ac.id, 2011

tersebut yaitu bahwasannya barang yang Indonesia yang dikeluarkan dari Pintu yang tidak resmi melalui negara tetangga dan itu adalah penghianatan. Pandangan tersebut tercetus ketika beliau melakukan kunjungan kenegaraan di Beijing pada 24 Maret 2012.³⁶

Pada masa presiden SBY hubungan antara Indonesia dengan China mengalami peningkatan atas nilai perdagangan mencapai USD80 miliar yaitu pada tahun 2015 dan juga hubungan Indonesia dengan China di masa Susilo Bambang Yudoyono juga memperkuat kerja sama dalam bidang Industri, Sumber daya manusia dan energi dan juga memperkuat kerja sama pada berbagai bidang dengan nilai lebih dari USD17,4miliar. Melalui Presiden China Hu Jiantao bahwa Republik Rakyat China akan menegaskan untuk mempromosikan kemitraan strategis Republik Rakyat China dengan Indonesia di beberapa area kerja sama perdagangan, pertahanan, maritim dan ekonomi serta kerja sama dalam urusan regional dan internasional. Era Baru adalah istilah dari kerjasama Bilateral Republik Indonesia dengan Republik Rakyat China. Pemerintah Indonesia mengatakan kerja sama ekonomi dengan Cina yang ditandatangani oleh petinggi kedua negara di Jakarta hari Rabu 02 Oktober 2013 merupakan penanda dimulainya sebuah era baru. Pada sebelumnya kerja sama Republik Indonesia dengan Republik Rakyat China yang lebih mendominasi perdagangan, pada masa bapak SBY mulai melakukan pergeseran dalam kerja sama yaitu mengarah ke industrialisasi dan pembangunan yang bersifat non perdagangan. China juga berupaya mendorong kerjasama pragmatis yang mendorong kesejahteraan bersama. Kedua negara selama ini punya kepentingan luas mulai investasi, infrastruktur dan energi. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, nilai investasi China ke Indonesia pada Kuartal I 2013 nilainya mencapai US\$ 60,2 juta dari 99 proyek yang

³⁶ www.sindonews.com 2012

dijalankan. Sedangkan nilai ekspor nonmigas Indonesia ke Cina pada Semester I 2013 mencapai US\$ 10,09 miliar.

8. China dan Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan keberagaman maupun hasil kekayaan alam. Atas potensi tersebut banyak negara yang tertarik untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia salah satunya adalah negara China. China merupakan negara yang penduduknya terpadat di dunia, sedangkan Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar ke-4 di dunia. Hubungan bilateral antara Indonesia dan China terutama dalam bidang ekonomi saat ini terus meningkat. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya nilai jual beli antara Indonesia dan China pada tahun 2008 yang mencapai US\$ 31 miliar.

Pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menyepakati kerja sama pada delapan bidang. Penandatanganan nota kesepahaman bersama (Memorandum of Understanding/MoU) dilaksanakan di Great Hall of The People oleh para pejabat Indonesia dan Tiongkok dan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping.³⁷

Terdapat 8 MoU yang ditandatangani, yaitu :

- 1) Nota kesepahaman kerja sama ekonomi antara Kemenko Perekonomian RI dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional RRT,
- 2) Nota kesepahaman kerja sama Proyek Pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung antara Kementerian BUMN dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional RRT.

³⁷ <https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Peringatan-60-Tahun-Hubungan-Diplomatik-Republik-Indonesia-Republik-Rakyat-Tiongkok.aspx>

- 3) Nota Kesepahaman kerja sama maritim dan SAR antara Basarnas dan Kementerian Transportasi RRT.
- 4) Kerja sama antara Protokol Persetujuan antara Pemerintah RRT dan RI dalam pencegahan pengenaan pajak ganda kedua negara.
- 5) Kerangka Kerja Sama Antariksa 2015-2020 antara Lapan dan Lembaga Antariksa RRT.
- 6) Nota kesepahaman kerja sama saling dukung antara Kementerian BUMN dan Bank Pembangunan China Pembangunan.
- 7) Nota kesepahaman antara pemerintah RRT dan RI dalam pencegahan pengenaan pajak ganda kedua negara dan
- 8) Nota kesepahaman kerja sama bidang industri dan infrastruktur antara Kementerian BUMN dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional RRT.

9. China dan Malaysia

Malaysia dan China menandatangani perjanjian Program Lima Tahun Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan dari tahun 2013 hingga 2017 yang bertujuan memperkuat kerjasama bilateral dalam berbagai sektor. Penandatanganan perjanjian itu disaksikan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak dan Presiden China, Xi Jinping ketika mereka menghadiri Sidang Kemuncak Ekonomi Malaysia-China di Kuala Lumpur.

Dalam perjanjian itu, Malaysia diwakili Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Mustapa Mohamed sedangkan China oleh Menteri Perdaganganannya, Gao Hucheng. Selain itu, kedua negara juga menandatangani perjanjian guna membangun Majlis Kerjasama bagi Taman Perindustrian China-Malaysia di Qinzhou dan Taman Perindustrian Malaysia-China di

Kuantan, Pahang. Najib mengatakan bahwa program itu akan menguatkan lagi hubungan kedua negara sekaligus menjadi penanda langkah seterusnya dalam memperkuat kerjasama pada masa akan datang. Perdana Menteri berkata, pembangunan kampus Universiti Xiamen Malaysia juga akan memperkuat hubungan kedua negara.³⁸

10. China dan Singapura

Hubungan Cina dengan Singapura dalam perdagangan ekonomi bilateral meningkat dari US \$ 5,2 Milyar mencapai US \$ 21.6 Milyar dari tahun 1990 sampai 2000, hamper mencapai empat kali lipat dalam satu dekade. Dari 2000 sampai 2007, dari US \$ 21.6 Milyar mencapai 91,6 Milyar. Pada tahun 2006, Cina telah menjadi Partner perdagangan terbesar Singapura, setelah Malaysia, Uni Eropa dan Amerika Serikat. Pada Tahun 2008, Singapura dan Cina memutuskan sebuah Perdagangan Bebas (FTA) selama periode Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengunjungi Beijing. Perdagangan Bebas ini merupakan hal pertama bagi pemerintah Cina dengan Negara Asia. Hal itu menggambarkan bahwa kedua negara, Cina dan Singapura sepakat untuk membuka hubungan yang terbuka, dan mempromosikan perdagangan bebas. Kesepakatan ini juga diharapkan memaju investasi dan perdangan yang lebih kuat anatara kedua negara. China-Singapura Suzhou Industrial Park adalah salah satu taman industry internasional dengan teknologi tinggi, mirip seperti taman urban modern disekitar danau Jinji.³⁹

³⁸

<https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2018/05/342872/hubungan-diplomatik-china-malaysia-lebih-kukuh>

³⁹ <https://www.merdeka.com/politik/singapura-cina-tingkatkan-hubungan-bilateral-zox1thb.html>

11. China dan ASEAN

C-AFTA merupakan regionalisasi perdagangan bebas antara negara China dan ASEAN. Latar belakang munculnya gagasan tersebut adalah menilik pergeseran keseimbangan kekuatan ekonomi yang mulai bergerak ke arah “Kerajaan Timur Tengah” (middle kingdom) saat ini. Sehingga perlu adanya usaha untuk membentuk suatu integrasi perekonomian di negara ASEAN dan China.

Kerjasama C-AFTA ini merupakan bentuk dari kerjasama perdagangan dan ekonomi di wilayah ASEAN dan China yang berupa kesepakatan untuk menciptakan situasi perdagangan yang seimbang dan adil melalui penurunan tarif barang perdagangan dimana tidak ada hambatan tarif maupun non tarif bagi negara-negara ASEAN dan China. C-AFTA ini juga meliputi wilayah perdagangan bebas yang mencakup seluruh kawasan sepuluh negara anggota ASEAN (2002) dan sejak tahun 2003 termasuk Cina. Arus lalu lintas perdagangan yang berasal dari negara peserta bebas keluar masuk hanya dengan hambatan tarif bea masuk maksimal 5% dan pada tahun 2010 tarif produk- produk tersebut akan dihapus menjadi 0%.

Pembentukan C-AFTA diharapkan dapat meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dan China dengan menjadikan ASEAN dan China sebagai basis produksi pasar dunia, diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meratakan kesejahteraan ekonomi dengan banyak terbukanya lapangan kerja. Hal ini tentunya akan memberikan manfaat yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN dan China.

Adanya kerjasama China-Asean Free Trade Agreements (C-AFTA) sebagai bentuk pengembangan market yang lebih luas. Dengan jumlah total penduduk mencapai 1.7-1.8 miliar jiwa, pasar China – ASEAN

merupakan pasar yang luar biasa luas dan potensial untuk seluruh anggota ASEAN dan China sendiri. Dengan total penduduk sekian banyak – mencapai sekitar 30% total penduduk dunia, adalah kekuatan ekonomi yang tidak main-main.

Apalagi jika nantinya FTA (Free Trade Area) makin terbuka bukan semata C-AFTA, tapi ditambah dengan India, Taiwan, Jepang, dan kemungkinan Australia, bukan tak mungkin akan menjadi kekuatan ekonomi (dan politis, mungkin) terbesar di dunia. Jumlah penduduk akan mencapai 50% total penduduk dunia dan bisa dibayangkan berapa besar kekuatan ekonominya.⁴⁰

C. Organisasi Internasional yang diikuti oleh China

Dan juga China aktif dalam mengikuti organisasi internasional, yang mana hal ini menunjukkan China juga menganut paham liberalisme. Keikutsertaan China dalam berbagai kerjasama ekonomi menunjukkan besarnya kepentingan nasional China terhadap pemenuhan tuntutan dan kebutuhan ekonomi domestik. Hal ini juga sekaligus digunakan China untuk membantu menuntaskan masalah-masalah domestik yang berkaitan dengan ekonomi seperti kemiskinan dan keterbelakangan. Begitu banyak kerjasama ekonomi yang diikuti oleh China, seperti World Trade Organisation (WTO), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Shanghai Cooperation Organisation (SCO), ASEAN Plus Three (APT), G-20, dan juga OPEC. Dalam konteks regional, China dan ASEAN telah menyepakati dibentuknya zona perdagangan bebas China-ASEAN (ASEAN-China Free Trade Area, ACFTA) yang diberlakukan bagi semua negara ASEAN sejak Desember

⁴⁰ <https://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/ASEAN-China-Centre-Mendorong-Penguatan-Kerja-Sama-ASEAN---RRT.aspx>

2009. Dalam keikutsertaan China di berbagai forum ekonomi dunia tersebut, China telah menunjukkan bahwa mereka merupakan mesin penggerak ekonomi dunia, dengan cadangan devisa 1,8 Triliun Dollar AS per Mei 2008. Berdasarkan data yang didapat dari Kementerian Perdagangan China, China merupakan negara pengeksport terbesar ketiga dunia dengan peningkatan total GDP sebesar 12 % di volume 3,24 triliun Dollar AS. Oleh karena itu China merupakan negara pengeksport terbesar di Asia. Kenyataan tersebut membuat China menempati posisi dan peranan penting dalam ekonomi dunia.

Hubungan Eropa-China memang telah memasuki babak baru dimana Uni Eropa mulai menunjukkan soliditasnya, disamping itu China juga telah menunjukkan geliat ekspansi ekonominya di Eropa. Presiden Perancis Jacques Chirac pernah melakukan kunjungan kenegaraannya ke China pada tahun 2004. Kunjungan tersebut ditujukan untuk melakukan pendekatan ke China atas kontrak pesawat Airbus, Kereta Api Alstom, pusat pengolahan air, peralatan hidroelektrik, dan juga ekspor gandum seharga 5 miliar Euro. China adalah negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang juga memiliki hak veto di PBB. China merupakan salah satu dari negara penyumbang terbesar pasukan penjaga perdamaian PBB, yaitu sebanyak 1.955 pasukan yang tersebar di 12 misi perdamaian PBB pada bulan Juni 2008. China telah mengikuti lebih dari 130 organisasi internasional dan juga telah menyatakan komitmennya terhadap 267 perjanjian-perjanjian multilateral.

Sebagai kekuatan baru yang berpengaruh, China sedang melakukan penyesuaian terhadap sistem internasional yang didominasi oleh kekuatan negara-negara Barat. China merupakan negara yang memegang peranan penting dalam PBB dan juga WTO. China memandang bahwa keikutsertaannya dalam PBB dan WTO merupakan sarana untuk mempromosikan tujuan-tujuan strategis dan

juga prinsip-prinsip yang diyakini oleh China. Keikutsertaan tersebut diiringi dengan upaya meyakinkan bahwa China memiliki komitmen terhadap hukum internasional yang berlaku, prinsip persamaan, demokratisasi di tingkat internasional, serta memastikan dunia terhadap prinsip China atas perdamaian dan tanggung jawab. Keikutsertaan China dalam Shanghai Cooperation Organization (SCO) di Asia Tengah dan ASEAN Plus Three di Asia Tenggara dapat dijadikan contoh.

D. Kebijakan yang diambil oleh Indonesia menghadapi krisis

I. Langkah-Langkah Strategis 1997-1999

Untuk mengurangi tekanan depresiasi Rupiah, kebijakan-kebijakan moneter yang ditempuh melingkupi berbagai hal, antara lain pelebaran band intervensi, pembatasan transaksi valuta asing oleh perbankan, perubahan system nilai tukar dan pengetatan likuiditas perbankan.

Untuk mengurangi tekanan depresiasi Rupiah, kebijakan-kebijakan moneter yang ditempuh melingkupi berbagai hal, antara lain pelebaran band intervensi, pembatasan transaksi valuta asing oleh perbankan, perubahan system nilai tukar dan pengetatan likuiditas perbankan. Berbagai langkah tidak sepenuhnya berhasil menahan laju depresiasi rupiah karena krisis dimaksud dalam waktu singkat telah berkembang dari semula krisis moneter menjadi krisis ekonomi, krisis sosial budaya, dan krisis politik sehingga menjadi krisis multidimensi.

Kala itu depresiasi rupiah tetap berlangsung hingga pernah mencapai 600% dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, yaitu dari Rp. 2.350,- menjadi Rp. 16.000,- per 1 USD. Sementara itu, suku bunga antar bank sempat

mencapai 60% per tahun. Akibat lainnya distribusi barang sempat mengalami kemandegan menunggu kestabilan harga dan keamanan, terutama karena terjadi demonstrasi dan

pengerusakan pusat-pusat perdagangan oleh massa di berbagai kota. Hingga akhir periode ini, pertumbuhan ekonomi menurun 13,7%, harga barang-barang melonjak, perusahaan-perusahaan gulung tikar, pengangguran meningkat dan beberapa fasilitas umum serta pusat perdagangan rusak berat.

2. Kebijakan Devisa di Indonesia 1997-1999

Pada periode ini kebijakan devisa yang dianut masih devisa bebas berdasarkan PP No. 1 tahun 1982 yang kemudian diperkuat dengan Undang-undang No 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Pada periode ini kebijakan devisa yang dianut masih devisa bebas berdasarkan PP No. 1 tahun 1982 yang kemudian diperkuat dengan Undang-undang No 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Dalam Undang-undang tersebut ditetapkan bahwa setiap penduduk bebas memiliki dan menggunakan devisa, namun wajib memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa yang dilakukannya.

Atas dasar pengaturan tersebut maka Bank Indonesia mewajibkan bank-bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan transaksi devisa maupun dalam pengelolaannya. Sementara itu, pemilihan dan

penggunaan devisa oleh masyarakat umum belum diatur system pelaporannya. Berbagai kebijakan pada periode sebelumnya, khususnya dalam rangka pengembangan Penanaman Modal Asing (PMA) maupun pinjaman luar negeri, telah meningkatkan cadangan devisa

di awal tahun 1997, apalagi investor asing semakin tertarik menanamkan dana di Indonesia.

Akan tetapi krisis nilai tukar Rupiah terhadap valuta asing, terutama dollar Amerika sejak Juli 1997, telah mengakibatkan pembelian devisa oleh sektor swasta meningkat tajam sehingga cadangan devisa Indonesia nyaris deficit, padahal jumlah pinjaman luar negeri saat itu cukup besar. Di pihak lain, terdepresiasinya Rupiah yang sangat dalam telah memperlemah daya beli devisa untuk pembayaran utang luar negeri. Kondisi ini salah satu risikonya adalah bahwa letter of credit (l/c) yang diterbitkan oleh bank-bank nasional tidak diterima di luar negeri. Risiko selanjutnya, pasokan barang-barang impor terpenting seperti obat-obatan dan makanan bayi menjadi langka. Untuk mengatasi hal ini maka Bank Indonesia memberikan jaminan tunai atas l/c-l/c dimaksud.

Namun demikian pinjaman luar negeri tersebut bersifat selektif, yaitu harus memenuhi kriteria-kriteria :

- 1) Tidak dikaitkan dengan ikatan politik
- 2) Selalu mengutamakan pinjaman dengan persyaratan ringan
- 3) penggunaannya disesuaikan dengan rencana pembangunan
- 4) Senantiasa disesuaikan dengan kemampuan membayar kembali.

3. Kebijakan nilai tukar di Indonesia 1997-1999

Sejak awal paruh kedua Juli 1997, nilai tukar Rupiah terdepresiasi terhadap valuta asing, terutama USD. Demikian cepatnya proses penurunan Rupiah tersebut terjadi sehingga menimbulkan kepanikan pasar. Sejak awal paruh kedua Juli 1997, nilai tukar Rupiah terdepresiasi terhadap valuta asing, terutama dolar AS. Demikian

cepatnya proses penurunan Rupiah tersebut terjadi sehingga menimbulkan kepanikan pasar. Berbagai kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia tidak berhasil menghentikan laju penurunan nilai tukar tersebut, baik dalam bentuk pelebaran band intervensi, pengetatan likuiditas perbankan maupun moral suasi kepada para pelaku pasar. Untuk menyelamatkan cadangan devisa maka pada tanggal 14 Agustus 1997 band intervensi dilepas dan selanjutnya Indonesia menerapkan kebijakan nilai tukar mengambang hingga sekarang. Sistem ini kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang No.23 dan 24 Tahun 1999. Dalam Undang-undang tersebut ditetapkan bahwa sistem nilai tukar di Indonesia ditetapkan oleh Pemerintah setelah mendengar rekomendasi dari Bank Indonesia. Hal ini dilakukan karena sistem nilai tukar akan berdampak sangat luas, tidak saja terhadap kegiatan bidang moneter dan sektor keuangan, tetapi juga kegiatan ekonomi riil.

4. Kebijakan hutang luar Negeri 1997-1999

Melemahnya nilai tukar rupiah yang berkepanjangan mengakibatkan beban pembayaran hutang luar negeri meningkat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sebagian hutang luar negeri swasta tidak dilindungi nilai, penggunaan hutang jangka pendek untuk pembiayaan usaha jangka panjang, serta hutang luar negeri yang dipergunakan untuk pembiayaan usaha yang berorientasi domestik. Melemahnya nilai tukar rupiah yang berkepanjangan mengakibatkan beban pembayaran hutang luar negeri meningkat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sebagian hutang luar negeri swasta tidak dilindungi nilai, penggunaan hutang jangka pendek untuk pembiayaan usaha jangka panjang, serta hutang luar negeri yang dipergunakan untuk pembiayaan usaha yang berorientasi domestik. Di samping itu, melemahnya nilai tukar juga menurunkan kepercayaan kreditur terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali hutang-

hutangnya. Akibatnya, sektor swasta mengalami kesulitan mendapatkan roll over bagi utang yang jatuh tempo dan mengakibatkan krisis hutang swasta. Kebijakan yang ditempuh dalam penyelesaian hutang luar negeri swasta, tim penyelesaian hutang luar negeri swasta yang didukung oleh Pemerintah melakukan serangkaian perundingan dengan kreditur luar negeri yang diwakili oleh *Bank Steering Committee*. Perundingan yang dilakukan di Frankfurt pada 4 Juni 1998 mencapai kesepakatan mengenai penyelesaian pinjaman antara bank, pinjaman perusahaan swasta dan pembiayaan perdagangan. Penyelesaian utang antar bank dilakukan melalui program pertukaran hutang antarbank (*exchange offer*). Pada tahap pertama pinjaman yang dipertukarkan adalah pinjaman yang jatuh waktu sampai dengan 31 Maret 1999 yang dijadwalkan kembali menjadi pinjaman baru dengan maksimum jatuh waktu 4 tahun. Jumlah pinjaman bank nasional kepada kreditur luar negeri yang sudah dipertukarkan mencapai US\$ 3miliar dengan melibatkan 41 bank peserta. Dari jumlah tersebut, yang dijadwalkan kembali dengan jatuh waktu 1 tahun sebesar 13,3%, 2 tahun 26,6%, 3 tahun 48,0%, dan 4 tahun 12,1%. Berkaitan dengan penyelesaian hutang luar negeri jangka pendek perusahaan swasta, Pemerintah membentuk INDRA yang berfungsi sebagai lembaga perantara antara perusahaan debitur dan kreditur luar negeri. Dalam perkembangannya, INDRA melakukan penyesuaian atas skim-skim kredit tersebut. Berkaitan dengan program INDRA, Pemerintah membentuk Satuan Tugas Prakarsa Jakarta yang berfungsi sebagai fasilitator bagi perusahaan-perusahaan yang menghadapi masalah dalam menyelesaikan pinjamannya sehingga debitur dapat memilih untuk mengikuti program INDRA atau memilih cara lain, seperti *debt to equity swap* dan upaya penyelesaian di luar pengadilan. Dalam pelaksanaannya sampai dengan akhir tahun 1998 satuan tugas tersebut telah menangani 122 kasus dengan nilai utang sebesar USD15,5 milyar. Dalam hal hutang luar

negeri sektor pemerintah, dilakukan upaya restrukturisasi melalui penandatanganan MOU Paris Club pada 23 September 1998 dengan kreditur yang diwakili oleh 17 negara donor. Perjanjian tersebut menandai adanya penjadwalan kembali kewajiban pembayaran utang pokok yang jatuh tempo dalam masa konsolidasi, yakni terhitung sejak awal Agustus 1998 hingga akhir Maret 2000. Berdasarkan MOU Paris Club, pinjaman yang akan direstrukturisasi berjumlah USD4,2 milyar, terdiri dari pinjaman lunak sebesar USD1,2 milyar dan fasilitas kredit ekspor sebesar USD3 milyar. Pinjaman lunak dijadwalkan kembali atau dibiayai dengan pinjaman baru berjangka waktu 20 tahun, termasuk masa tenggang 5 tahun dengan tingkat bunga yang berlaku bagi pinjaman lunak. Fasilitas kredit ekspor dibiayai kembali atau dijadwalkan dengan jangka waktu 11 tahun, termasuk masa tenggang 3 tahun dengan tingkat bunga pasar.

Dalam memulihkan kondisi perekonomian akibat krisis 1997 dan krisis 2008, pengaruh kebijakan didasarkan pada kondisi makroekonomi Indonesia dan dampak sistemik yang ditimbulkan. Peran pemerintah dalam mengatasi dampak krisis Asia 1997 melakukan stimulus dengan meningkatkan tingkat suku bunga. Kenaikan pada tingkat suku bunga tabungan menaikkan tabungan masyarakat sehingga akan mengurangi jumlah uang beredar sekaligus menjadi pengontrol harga jangka panjang. Untuk menjaga kestabilan moneter, Bank Indonesia melakukan ekspansi BLBI, mulai memulihkan akses ke sumber pembiayaan luar negeri, dan mengubah sistem lelang SBI pada pelaksanaan operasi pasar terbuka. Rekonstruksi pada sektor perbankan dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan sektor keuangan melalui penutupan (14 bank, 1997, November dan 33 bank 1998, Maret) dan penggabungan bank serta melikuidasi 16 bank. Penyehatan perbankan dilakukan program rekapitalisasi, memperbaiki kondisi internal perbankan dan lebih

menekankan pada fungsi pengawasan bank. Mencegah terulangnya krisis, pemerintah meneruskan kembali program penjamin tabungan nasabah (tabungan maksimal Rp200 juta dijamin tahun 1998, sekarang Rp2miliar) dan membentuk BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional). Pemulihan akibat krisis 1997, lag kebijakan moneter membutuhkan waktu yang lama. Kemudian pemerintah melakukan pembatasan terhadap kebijakan fiskal. Pembatasan ini dimaksudkan memberikan stimulus fiskal melalui pembatasan APBN.

Sejak Januari 2009, Bank Indonesia mulai mengurangi tingkat suku bunga. Dengan tingkat bunga turun akan meningkatkan konsumsi dan investasi sehingga agregat output akan naik, namun kebijakan ini akan menimbulkan spekulatif terjadinya depresiasi nilai tukar akibat menurunnya likuiditas bank akibat penurunan interest rate. Kebijakan melakukan *recovery* terhadap perbankan juga dilakukan pada periode krisis tahun 2008. Untuk menghindari dampak sistemik akibat bank sakit yang bisa menimbulkan efek domino seperti tahun 1997, BI menginjeksi modal baru pada bank besar yang sakit sedangkan bank kecil ditutup. Namun, kebijakan ini tidak efektif karena tidak didukung dengan kebijakan fiskal yang kuat. Pemerintah menunjukkan manajemen fiskal yang lemah yaitu 80 persen kebijakan fiskal dialokasikan sebagai *tax saving* dan subsidi, bukan untuk pengeluaran langsung. Dengan tingkat defisit yang meningkat dari 1 persen (51triliun) menjadi 2,6 persen (137triliun). Pemerintah Indonesia kemudian mengubah kembali kebijakan pada sektor riil dengan lebih menekankan pada penambahan *value added* hal ini terbukti dengan kelanjutan pemerintah terhadap Konsensus Washington dan mulai terbuka dalam *Free Trade Area* strategi.

E. Organisasi Internasional yang diikuti Indonesia

Indonesia merupakan salah satu pendiri ASEAN atau *Association of South East Asian Nations* merupakan organisasi kerja sama regional negara-negara Asia Tenggara di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Meskipun organisasi ini bertekad mewujudkan stabilitas dan keamanan kawasan Asia Tenggara dari pengaruh asing, tetapi bukan merupakan organisasi politik. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang berdirinya ASEAN.

Kedua, Indonesia merupakan anggota dari Gerakan Non Block (GNB) Peranan Indonesia dalam Gerakan Non-Blok. Gerakan Non-Blok merupakan gerakan untuk tidak memihak salah satu blok kekuatan di dunia. Pendirian organisasi ini berperan dalam meredam ketegangan dunia. Keberadaan organisasi ini dapat membendung perluasan dari kedua blok yang berseteru. Gerakan ini diikuti oleh sejumlah negara termasuk Indonesia. Indonesia bukan saja sebagai negara anggota, tetapi juga pendirinya.

Indonesia juga salah satu anggota dari PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa merupakan salah satu organisasi internasional yang diikuti oleh hampir semua negara yang ada didunia ini. Organisasi ini berdiri pada 24 Oktober 1945 dan saat ini markas besarnya ada di Kota New York, Amerika Serikat. Indonesia pernah keluar dari organisasi ini dan kemudian masuk lagi menjadi bagian dari anggota.

The Group Twenty atau G-20 merupakan organisasi besar yang terdiri dari negara-negara yang memiliki perekonomian tertinggi didunia yaitu 20 negara (19 negara ditambah dengan Uni Eropa). Indonesia merupakan salah satu anggota organisasi ini karena saat ini Indonesia menempati urutan ke-16 dunia dalam sisi GDP (Gross Domestic Product) atau Produk Domestik Bruto dengan nilai sekitar 888 miliar US Dolar.

Konferensi Asia Afrika (KAA) Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. KAA diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar (dahulu Burma), Sri Lanka (dahulu Ceylon), India, dan Pakistan dan dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Sunario. Pertemuan ini berlangsung antara 18-24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia. Tujuannya mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya

Selanjutnya, Organisasi Konferensi Islam (OKI) ketahuilah bahwa Indonesia juga merupakan salah satu negara anggota OKI yang merupakan organisasi internasional yang anggotanya merupakan negara-negara yang memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam. Organisasi ini didirikan pada tanggal 25 September 1969 atau bertepatan dengan 12 Rajab 1389 di Kota Rabat yang merupakan salah satu kota dinegara Maroko (Afrika bagian utara).

F. Kerjasama Indonesia dengan negara lain

1. Indonesia dengan Amerika Serikat

Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence dan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla (JK) menyaksikan penandatanganan 11 kesepakatan kerja sama perdagangan dan investasi lebih dari USD10 miliar atau Rp133 triliun. Dalam kesepakatan tersebut, AS akan mendatangkan teknologi mutakhirnya guna mendukung kebutuhan energi di Indonesia dan mendukung proses limbah menjadi produk sampingan bernilai tinggi.

Dubes AS menyampaikan kesepakatan ini memperlihatkan dukungan perusahaan-perusahaan AS terhadap

upaya Indonesia untuk mendapatkan energi yang lebih bersih melalui pengembangan sumber daya panas bumi dan pasokan gas alam cair secara jangka panjang.⁴¹ Selain itu, melalui pengadaan peralatan teknologi mutakhir AS, Indonesia akan meningkatkan kemampuannya untuk menyediakan energi terbarukan dengan harga terjangkau. Dalam kesempatan yang sama, juga ditandatangani dua kesepakatan untuk meningkatkan kerja sama di sektor penerbangan dan pertahanan.

Berikut 7 kesepakatan kerja sama Indonesia dan AS di sektor komersial:

1. Applied Materials

Applied Materials dan PT PLN menandatangani kesepakatan untuk meningkatkan infrastruktur transmisi listrik Indonesia. Applied Materials akan menggunakan teknologi pembatas arus gangguan (fault current limiter) untuk meningkatkan infrastruktur 500 KW PLN.

2. Exxon Mobil

ExxonMobil menandatangani kontrak untuk memasok gas alam cair sebanyak 1 juta ton per tahun ke Pertamina, selama 20 tahun, mulai dari tahun 2025.

3. Greenbelt Resources

Greenbelt Resources [OTC:GRCO] dan PT Jababeka Infrastruktur menandatangani kesepakatan untuk mengembangkan fasilitas pengolahan limbah di Jababeka, yang dinamakan JababECO. Proyek ECOsystem ini yang menggunakan teknologi terdepan AS ini akan mewujudkan sustainable circular economy atau sistem ekonomi “melingkar” berkelanjutan dengan mengolah sampah makanan perkotaan

41

menjadi berbagai macam produk termasuk etanol, pakan ternak, pupuk, dan air suling. Fase pertama senilai USD4,5 juta, dengan nilai penjualan produk tambahan sebesar 6 juta dolar AS secara kumulatif selama lima tahun berikutnya.

4. Halliburton

Haliburton dan PT PLN telah menandatangani dua kesepakatan untuk mengembangkan sumber daya panas bumi Indonesia. Pada Februari, kedua belah pihak menandatangani kontrak manajemen proyek terintegrasi senilai USD34 juta untuk melakukan pengeboran dan merampungkan sumur panas bumi di Tulehu, Ambon. Kedua belah pihak juga telah menandatangani kesepakatan untuk membentuk aliansi strategis jangka panjang untuk pengembangan energi panas bumi. Dalam kerangka ini, kedua perusahaan akan mengembangkan konsesi panas bumi PLN, termasuk investasi potensial dari AS.

5. Honeywell

Honeywell telah dipilih oleh PT Dirgantara Indonesia (PTDI) untuk menyediakan 34 mesin turboprop TPE331 untuk NC212i selama empat tahun ke depan, yang akan meningkatkan kemampuan pesawat tersebut. Selain itu, Honeywell akan memberikan pelatihan TPE331 kepada para pakar mesin PTDI untuk meningkatkan keterampilan pemeliharaan lini dan mentransfer pengetahuan teknis ke perusahaan berbasis lokal. Kesepakatan ini akan meningkatkan kinerja PTDI sebagai produsen pesawat, sekaligus membuka lapangan pekerjaan di AS.

6. Lockheed Martin

Dalam kesepakatan ini, Angkatan Udara Indonesia akan membeli sniper advanced targeting pods produksi Lockheed Martin. Teknologi canggih, yang akan melengkapi pesawat F-16A/B yang ditempatkan di Pangkalan Udara Iswahyudi ini, akan meningkatkan ketahanan maritim dan wilayah Indonesia dalam menjalankan operasi bersama

Amerika Serikat dan mitra-mitra regional lainnya. Lockheed Martin akan memproduksi sniper ATP di Orlando, Florida dan bekerja sama dengan AU untuk melatih para pilot beserta personil pemeliharaan.

7. NextGen

NextGen dan Samarinda, Kalimantan Timur menandatangani nota kesepahaman awal untuk proyek pengolahan 800 ton per hari limbah rendah karbon atau pupuk biochar. Fasilitas ini akan memproses sampah kota menjadi listrik dan pupuk organik biochar sebesar 18 MW untuk mendukung pertanian setempat.

Proyek bernilai total USD70 juta tersebut akan dibangun, dimiliki, dan dioperasikan oleh NextGen dan mitra-mitranya dengan pendanaan swasta. Nota kesepahaman tersebut akan menyediakan kerangka untuk mengembangkan proyek dan proses pendanaan, dan akan diikuti oleh kesepakatan akhir untuk mengolah sampah antara Samarinda dan perusahaan proyek NextGen.

Proyek ini juga mencakup fasilitas pertanian dalam ruangan yang dimiliki bersama yang dikembangkan oleh Endless Sky Low Profit Limited Liability Company yang berbasis di AS, yang akan dioperasikan oleh perusahaan sosial baru untuk menciptakan lapangan kerja bagi pemulung sampah yang kini aktif bekerja di tempat pembuangan akhir (TPA) di Samarinda. Proyek ini sangat mungkin menjadi fasilitas gasifikasi limbah rendah karbon menjadi energi pertama yang beroperasi di Indonesia.

2. Indonesia dengan Singapura

Presiden RI, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Singapura, Lee Hsien Loong telah bertemu dalam kerangka Leaders' Retreat di Singapura. Dalam pertemuan tersebut,

Presiden RI dan PM Singapura menyambut baik berbagai perkembangan positif dalam hubungan bilateral, khususnya sejak Leaders' Retreat di Bogor.

Kedua Pemimpin juga menegaskan kembali komitmen bersama untuk senantiasa memajukan dan memperkuat hubungan bilateral ke depan. Kedua Pemimpin secara khusus menyambut gembira perkembangan hubungan bilateral di bidang ekonomi dan telah terbangun sangat baik. Hubungan perdagangan telah secara konsisten bergerak ke arah yang positif selama beberapa tahun terakhir.⁴²

Dalam hal ini, Singapura merupakan negara asal investor terbesar bagi Indonesia, sementara Indonesia merupakan mitra dagang terbesar kedua bagi Singapura diantara negara-negara ASEAN lainnya. Presiden RI dan PM Singapura menyambut baik perkembangan positif dalam enam working group di bidang ekonomi yang terbentuk sejak Leaders' Retreat 2010. Working Group Batam, Bintan, Karimun (BBK) dan Kawasan Ekonomi Khusus lainnya dan Working Group di bidang Investasi telah berhasil meningkatkan investasi di BBK dan kawasan lain, termasuk Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Working Group di bidang Ketenagakerjaan telah semakin memperkuat upaya pengembangan sumber daya manusia. Working Group di bidang Perhubungan Udara telah memperluas hubungan udara di antara kedua negara, sementara Working Group di bidang Pariwisata terus menggali potensi dalam bidang cruise tourism dan pengembangan Meeting, Incentives, Conference and Exhibitions (MICE) guna meningkatkan arus wisatawan.

Selanjutnya, Working Group di bidang Agribisnis telah berhasil memperkuat kemitraan antara importir dari Singapura dan pengusaha Indonesia, sekaligus meningkatkan volume

⁴² <https://news.detik.com/berita/3662276/dubes-ri-ingin-hubungan-bilateral-dengan-singapura-ditingkatkan>

ekspor buah dan sayuran Indonesia ke Singapura. Di bidang kontra-terorisme, kedua Pemimpin menyambut baik penguatan kerja sama bilateral di bidang penanggulangan terorisme dalam kerangka Working Group. Disamping itu, kedua Pemimpin juga membahas upaya bersama untuk meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan, pariwisata, lingkungan hidup, pertahanan dan intelijen.

Selain itu, Indonesia dan Singapura juga bekerjasama dalam bidang Pendidikan. Komitmen kerja sama di bidang pendidikan vokasi, juga terimplementasi melalui penandatanganan MoU antara Menperin RI dengan Menteri Pendidikan Singapura, Technical Arrangement (TA) antara Sekjen Kemenperin dengan Direktur Kampus Institute of Technical Education (ITE) Singapura, dan Collaborative Agreement antara KapUS\$ iklat Industri dengan ITE Education Services (ITEES) Singapura. Lebih lanjut, Menperin menyampaikan, sebanyak 25 kepala sekolah dan guru dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) asal Indonesia akan mengikuti pelatihan kepemimpinan di Kampus ITE Singapura.⁴³

3. Indonesia dengan Brunei Darussalam

Hubungan Indonesia dan Brunei Darussalam bisa dibilang sangat hangat dan ramah, tidak ada masalah satupun yang terjadi antara kedua belah pihak, bahkan saat Indonesia sedang krisis ekonomi, Brunei Darussalam tetap menjaga kerjasama antara kedua belah pihak.

Pada bulan November 1999, kedua negara sepakat untuk membentuk Komisi Bersama pada tingkat Menlu untuk menggali berbagai potensi kerjasama di antara kedua negara. Pertemuan Komisi Bersama yang pertama berlangsung di Jakarta tanggal 25 Juli 2003, sementara pertemuan kedua

⁴³ <https://finance.detik.com/industri/d-3872536/ri-singapura-tingkatkan-kerja-sama-industri>

(terakhir) diadakan di Bandar Seri Begawan tanggal 18 Agustus 2006.

Pada kesempatan tersebut, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang antara lain perdagangan, kebudayaan, pertahanan, kesehatan, penerangan, ketenagakerjaan serta mendorong peningkatan hubungan antarswasta dan masyarakat kedua negara.⁴⁴

Kerja sama yang masif selanjutnya antara Indonesia dan Brunei Darussalam adalah dalam bidang perdagangan. Dalam bidang ini kedua negara bekerja sama karena kedua negara saling melengkapi dalam beberapa sektor. Brunei memiliki komoditas mineral yang mereka andalkan sebagai barang ekspor mereka terhadap Indonesia. Brunei mengeksport minyak, gas alam, *transport equipment*, *cached head petroleum* dan *machinery*. Sedangkan Indonesia memiliki komoditas industri, diantaranya mie instan, makanan bayi, minuman ringan, obat-obatan, jamu, kosmetik, alat-alat listrik dan elektronik, tekstil, furniture, bahan bangunan, peralatan olahraga, rokok, kendaraan bermotor dan suku cadangnya.

Nilai total perdagangan antara Indonesia dan Brunei Darussalam pada tahun 2008 mencapai US\$ 2,476 milyar, naik dari total perdagangan tahun 2007, yaitu sejumlah US\$ 1,9 milyar.⁴⁵ Pertumbuhan pendapatan kedua negara karena hubungan yang terjalin terus meningkat setiap tahunnya. Diatas 10% setiap tahunnya. Neraca perdagangan kedua negara khususnya selama lima tahun terakhir menunjukkan defisit bagi Indonesia. Hal ini karena Indonesia banyak mengimpor minyak dari Brunei Darussalam.

⁴⁴

<https://nasional.kompas.com/read/2015/02/08/07401031/Indonesia-Brunei.Jalin.Kerja.Sama.Kesehatan.dan.Perdagangan>

⁴⁵ <https://www.kompasiana.com/hilmy-fadhilah/5a95599fcb52360975baf42/hubungan-bilateral-antara-indonesia-dan-brunei-darussalam>

Selain perdagangan, Indonesia juga menawarkan Brunei untuk berinvestasi di Indonesia. Indonesia mempromosikan keadaan ekonomi yang kondusif, iklim investasi yang bagus dan kebijakan fiskal yang tidak menyulitkan investor. Ada beberapa sektor investasi yang ditawarkan kepada Brunei Darussalam, yaitu proyek infrastruktur seperti energi (10,000 MW) dan pembutan jalan tol Trans Jawa. Semua ini dijadikan senjata andalan untuk menarik investor agar tertarik untuk berinvestasi di Indonesia.

Sebaliknya Sultan Hassanah Bolkia mengungkapkkan bahwa Brunei dan Indonesia akan senantiasa bekerja sama demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat kedua negara. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara sepakat untuk mempererat kerjasama dalam bidang perdagangan dan juga kesehatan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hubungan bilateral antara Indonesia dan Brunei Darussalam terjalin baik, dalam sektor perdangan kedua negara memiliki kepentingan yang saling melengkapi, hal ini membuat hubungan berjalan semakin baik. Dari tahun ke tahun hubungan kedua negara tak mengalami masalah yang berarti sehingga membuat hubungan keduanya mengalami peningkatan yang signifikan dan menguntungkan.

4. Indonesia dan China

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan keberagaman maupun hasil kekayaan alam. Atas potensi tersebut banyak negara yang tertarik untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia salah satunya adalah negara China. China merupakan negara yang penduduknya terpadat di dunia, sedangkan Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar ke-4 di dunia. Hubungan bilateral antara Indonesia dan China terutama dalam bidang ekonomi saat ini terus meningkat.

Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya nilai jual beli antara Indonesia dan China pada tahun 2008 yang mencapai US\$ 31 miliar.

Pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menyepakati kerja sama pada delapan bidang. Penandatanganan nota kesepahaman bersama (Memorandum of Understanding/MoU) dilaksanakan di Great Hall of The People oleh para pejabat Indonesia dan Tiongkok dan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping, Kamis

Terdapat 8 MoU yang ditandatangani, yaitu :

- 1) Nota kesepahaman kerja sama ekonomi antara Kemenko Perekonomian RI dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional RRT,
- 2) Nota kesepahaman kerja sama Proyek Pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung antara Kementerian BUMN dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional RRT.
- 3) Nota Kesepahaman kerja sama maritim dan SAR antara Basarnas dan Kementerian Transportasi RRT.
- 4) Kerja sama antara Protokol Persetujuan antara Pemerintah RRT dan RI dalam pencegahan pengenaan pajak ganda kedua negara.
- 5) Kerangka Kerja Sama Antariksa 2015-2020 antara Lapan dan Lembaga Antariksa RRT.
- 6) Nota kesepahaman kerja sama saling dukung antara Kementerian BUMN dan Bank Pembangunan China Pembangunan.
- 7) Nota kesepahaman antara pemerintah RRT dan RI dalam pencegahan pengenaan pajak ganda kedua negara dan

- 8) Nota kesepahaman kerja sama bidang industri dan infrastruktur antara Kementerian BUMN dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional RRT.⁴⁶

⁴⁶ <https://www.kemlu.go.id/berita/siaran-pers/Pages/Peringatan-60-Tahun-Hubungan-Diplomatik-Republik-Indonesia-Republik-Rakyat-Tiongkok.aspx>